



LKIP 2025



**BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BOGOR**


JL. SEGAR III KOMPLEK PERKANTORAN
PEMDA BOGOR NO.KAV. 2, TENGAH,
KEC. CIBINONG, KABUPATEN BOGOR,
KODE POS 16914

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini menyajikan data secara komprehensif terkait akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Tahun 2025-2029.

LKIP Bappedalitbang Tahun 2025 disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS		
KANLEAG/SUBKOORDINATOR		

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Dr. BAMBAM SETIA AJI, S.T., M.B.A.
NIP. 19730501 200501 1 009

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini menyajikan data secara komprehensif terkait akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Tahun 2025-2029.

LKIP Bappedalitbang Tahun 2025 disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Dr. BAMBAM SETIA AJI, S.T., M.B.A.
NIP. 19730501 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	11
1.4.1 Permasalahan.....	11
1.4.2 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan	12
1.5 Sumber Daya Manusia	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	19
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	21
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
BAB III	29
Akuntabilitas Kinerja	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	31
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Sekarang dengan Tahun Sebelumnya	32
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah Renstra	35
3.1.4 Perbandingan Kinerja dengan Skala Nasional/Provinsi	36
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	37
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	43
3.2 Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV	60
PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61

TUJUAN PD	Terwujudnya perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas			
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)		Indeks Riset dan Inovasi Daerah	
PERBANDINGAN CAPAIAN TUJUAN	TARGET 2025 Baik	CAPAIAN 2025 Sangat Baik	TARGET 2025 Sangat Baik	CAPAIAN 2025 Sangat Baik
SASARAN PD	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			
INDIKATOR SASARAN	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi Dasar Kebijakan Daerah	
PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	TARGET 2024 N/A	TARGET 2025 88 %	TARGET 2024 N/A	TARGET 2025 53,85 %
	REALISASI 2024 N/A	REALISASI 2025 89 %	REALISASI 2024 N/A	REALISASI 2025 53,85 %
	CAPAIAN 2024 N/A	CAPAIAN 2025 101,14 %	CAPKIN 2024 N/A	CAPAIAN 2025 100 %
	PENINGKATAN CAPAIAN 2024 N/A	PENINGKATAN CAPAIAN 2025 -	PENINGKATAN CAPAIAN 2024 N/A	PENINGKATAN CAPAIAN 2025 -
PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDEKS RISET DAN INOVASI DAERAH	
	TARGET AKHIR RENSTRA 2030 92 %	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 96,74 %	TARGET AKHIR RENSTRA 2030 78,57 %	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 68,53 %
PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL	IPPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 89 %	IPPN K/L TAHUN 2025 97,42 %	INDEKS RISET DAN INOVASI DAERAH	
			INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	INDEKS INOVASI DAERAH
REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2025 89 %	TARGET TAHUN 2026 89 %	KAB. BOGOR Sangat Baik	PROVINSI Sangat Baik
	TARGET TETAP		NASIONAL Unggul	KAB. BOGOR 94,40
	REALISASI TAHUN 2025 53,85 %	TARGET TAHUN 2026 64,86 %	PROVINSI 85,05	NASIONAL 96,80

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH YANG BERKUALITAS

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras
2. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras
3. Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Selaras
4. Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras
5. Hasil Riset dan Inovasi direkomendasikan menjadi Kebijakan

EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi Anggaran sebesar 3,96 % atau Rp. 1.426.361.631

CONTINUOUS IMPROVEMENT

1. Meningkatkan Persentase Nilai Komponen pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
2. Meningkatkan Indeks Riset dan Inovasi Daerah

PROGRAM TERKAIT

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Riset dan Inovasi Daerah



Perencanaan Pembangunan Daerah telah selaras dengan indikator Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah sebesar 100%. Artinya, seluruh Program pada dokumen RKPD telah sesuai dengan RPJMD serta Program pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah telah sesuai dengan RPJMD.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras didukung oleh Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 100%, kualitas analisis data dan informasi perangkat daerah terpenuhi sebesar 90%, Ketercapaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah meningkat sebesar 80%, serta Kualitas pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah dengan indikator pemanfaatan pengelolaan data pada SIPD meningkat sebesar 100%.

Upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu diantaranya; tersedianya Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD sebanyak 3 dokumen, terwujudnya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain, terlaksananya Konsultasi Publik, terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten/Kota, tersedianya 40 usulan yang telah terverifikasi oleh Kecamatan, ditetapkan 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD, terinputnya analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, terbinanya 511 orang dari berbagai Perangkat Daerah dalam pemanfaatan ata dan informasi perencanaan pembangunan, terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, tersusunnya 2 laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Pembangunan daerah serta terlaksananya pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah.

Keselarasan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dinilai dengan 3 indikator, diantaranya; indikator Keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian sebesar 97,41%, Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 79,69%, serta Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan rata-rata capaian sebesar 94,24%. Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebesar 89% yang menjadi angka capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD).

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 82%, Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 82% dan Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 82%.

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dalam upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan, Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan terlaksananya Sinkronisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Dalam upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian, Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dan terlaksananya Sinkronisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dalam upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur, Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan terlaksananya Sinkronisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

Adapun upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.

3. Hasil Riset dan Inovasi Daerah telah direkomendasikan menjadi Kebijakan dengan jumlah rekomendasi kebijakan berbasis riset dan inovasi yang dihasilkan sebanyak 7 rekomendasi.

Hasil Riset dan Inovasi Daerah telah direkomendasikan menjadi kebijakan didukung oleh terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan sebanyak 100%, terpenuhinya evaluasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar dengan indikator karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish sebesar 100% dan karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar sebesar 100%.

Adapun upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Riset dan Inovasi Daerah yaitu terlaksananya penyusunan 9 naskah kebijakan berbasis hasil riset, terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan Kerjasama internasional, terlaksananya fasilitasi an pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi, terlaksananya fasilitasi an pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, terlaksananya fasilitasi an pembinaan untuk peningkatan difusi inovasi, Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah, Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi, serta terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi.

Dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas diperlukan upaya-upaya perbaikan di tahun 2026 yaitu meningkatkan persentase nilai pada masing-masing komponen dan subkomponen pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) serta meningkatkan komponen Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Inovasi Daerah yang menunjang nilai Indeks Riset dan Inovasi Daerah.

Program yang mendukung pencapaian Harapan Lama Sekolah beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 3 (tiga) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Riset dan Inovasi Daerah. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 3,96% atau setara dengan Rp1.426.361.631,-. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 43.745.157.835 dan terealisasi sebesar Rp. 42.318.796.204,00.

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, seluruh indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tercapai. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tercapai sebesar 101,14% dan indikator Indeks Riset dan Inovasi Daerah tercapai sebesar 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Metode penyusunan LKIP Bapperida Kabupaten Bogor Tahun 2025 secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Selain itu, penyusunan LKIP juga mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dalam APBD Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini berisi informasi seputar capaian pelaksanaan Rencana Kerja, yang bertujuan untuk:

- a. Mengukur Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah;
- d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis selama Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor; dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Namun terdapat perubahan nomenklatur sejak berlakunya Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (3) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (5) Pelaksanaan administrasi Badan;
- (6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan badan dan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- (b) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- (c) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- (d) Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- (e) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- (f) Pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- (g) Pengelolaan hubungan masyarakat;
- (h) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- (i) Pengelolaan sistem informasi Badan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- (b) Penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- (c) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- (d) Penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD;
- (e) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- (f) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD;
- (g) Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan Daerah;
- (h) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- (i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan program kerja pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (b) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (c) Pelaksanaan supervisi pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (d) Penyusunan bahan rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (e) Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (f) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (g) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (h) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan program kerja pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (b) Penyusunan kebijakan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (c) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (d) Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (e) Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (f) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (g) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian/Lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (h) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

(6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan program kerja pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (b) Penyusunan kebijakan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (c) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (d) Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (e) Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (f) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (g) Pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (h) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- (i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

(7) Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan program kerja bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
- (b) Penyusunan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
- (c) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
- (e) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
- (f) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- (g) Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- (h) Pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- (i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (a) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
 - (b) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
 - (c) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
 - (d) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
 - (e) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Permasalahan dan isu strategis tersebut diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi organisasi dimasa yang akan datang.

1.4.1 Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian permasalahan yang di hadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan belum berkualitas;
2. Hasil riset dan Inovasi belum berkualitas;
3. Koordinasi kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal;

URAIAN	PERMASALAHAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Perencanaan Pembangunan belum berkualitas
	Hasil Riset dan Inovasi belum berkualitas
	Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah
Pelayanan Prima tata kelola Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal

1.4.2 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan

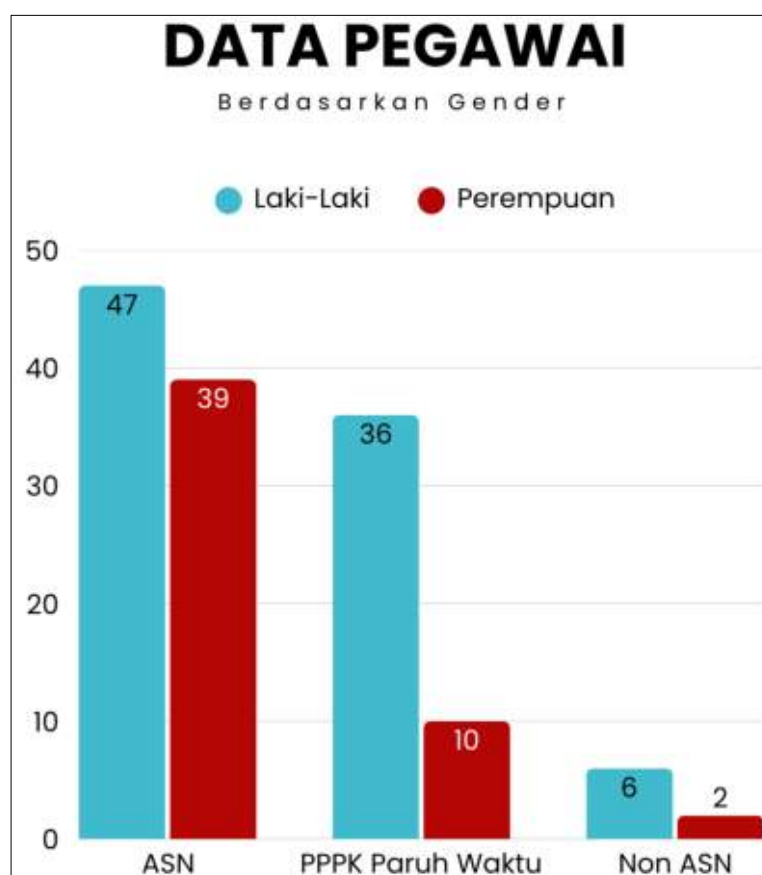
Berdasarkan permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dirumuskan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah :

NO.	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
1	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan belum berkualitas	Koordinasi Kebijakan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah yang belum optimal	Urbanisasi Dunia	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Hasil Riset dan Inovasi belum berkualitas	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya	Urbanisasi Dunia	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Kebijakan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Kebijakan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah	Urbanisasi Dunia	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.5 Sumber Daya Manusia

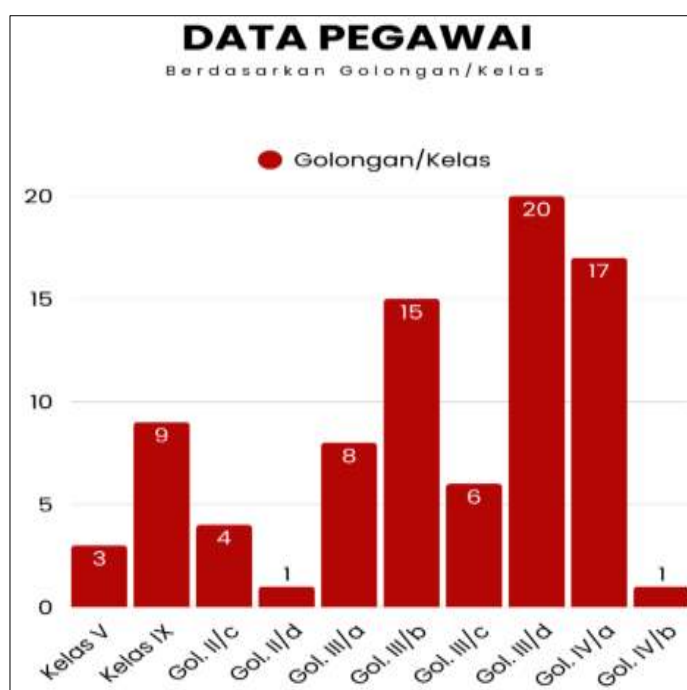
Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 terdapat sebanyak 86 Orang Pegawai ASN, 46 Orang Pegawai PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Non ASN sebanyak 8 orang dengan jumlah total pegawai Bapperida Kabupaten Bogor sebanyak 140 Orang dengan Profil Demografi Pegawai sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



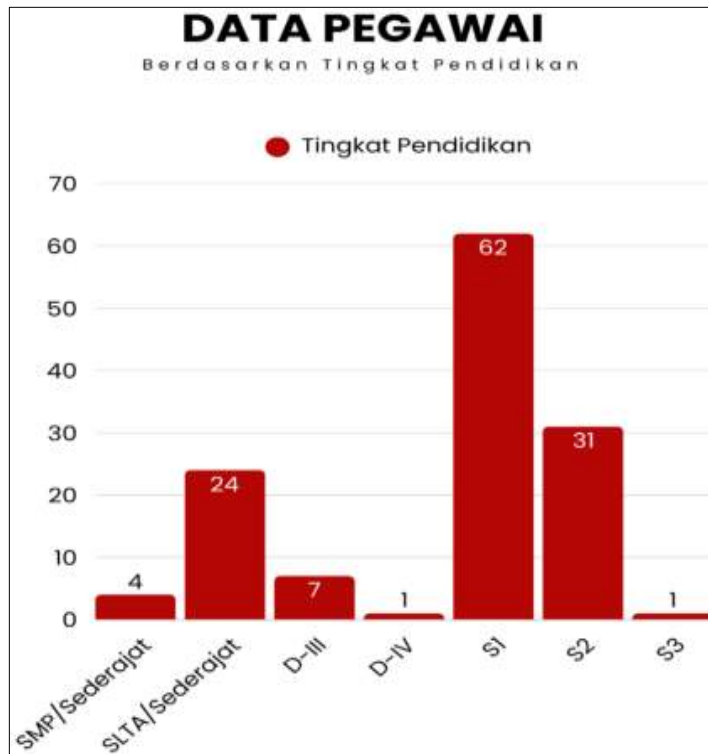
Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor di dominasi oleh laki-laki sebanyak 89 orang atau sekitar 63.57% dibandingkan dengan perempuan sebanyak 51 orang atau sekitar 36.43%.

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan



Berdasarkan diagram diatas Pegawai yang menempati golongan IV/b sebanyak 1 Orang, Golongan IV/a sebanyak 17 Orang, Golongan III/d sebanyak 20 orang, Golongan III/c sebanyak 6 orang, Golongan III/b sebanyak 15 orang, Golongan III/a sebanyak 8 orang, Golongan II/d sebanyak 1 orang, Golongan II/c sebanyak 4 orang. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menempati Kelas IX sebanyak 9 orang dan Kelas V sebanyak 3 Orang.

c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

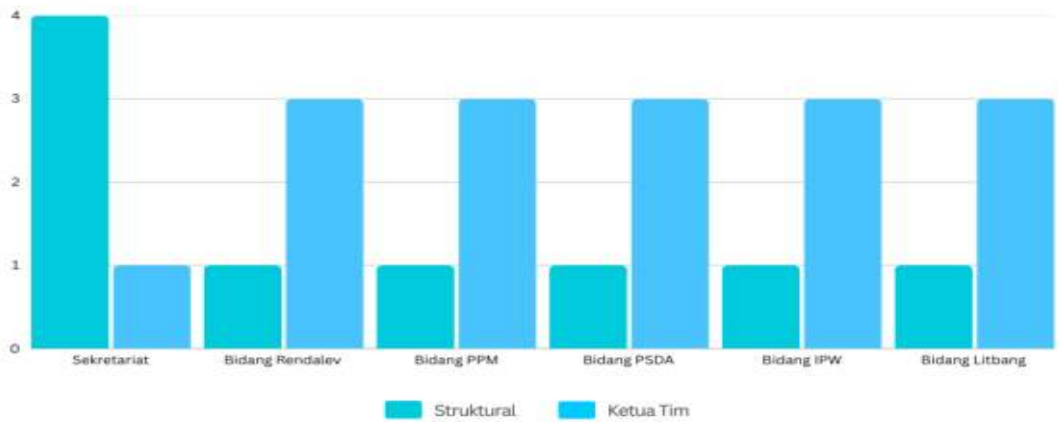


Berdasarkan diagram diatas Pegawai yang menempati tingkat Pendidikan SMP sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 24 orang, pegawai dengan tingkat Diploma III sebanyak 7 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma IV sebanyak 1 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 62 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 31 orang dan pegawai dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat tergambar bahwa terdapat potensi yang perlu ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

d. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 9 jabatan, dan Jabatan Fungsional Perencana sebagai Ketua Tim berjumlah 16 jabatan.



No	Bidang	Jabatan		Jumlah
		Struktural	Ketua Tim	
1	Sekretariat	4	1	5
2	Bidang Rendalev	1	3	4
3	Bidang PPM	1	3	4
4	Bidang PSDA	1	3	4
5	Bidang IPW	1	3	4
6	Bidang Litbang	1	3	4
Total		9	16	25

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- 2.1. Kesimpulan;
- 2.2. Saran

- LAMPIRAN** : 1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarki dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dan perencana pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2025 tentang SOTK Bapperida Kabupaten Bogor, maka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu Dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstra) Bapperida Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di perangkat daerah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam dokumen perencanaannya menetapkan tujuan yang sinergi dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Bogor. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas”

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan;

Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan							
1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.2	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Sasaran							
1.1.1	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	88	89	90	91	92	93
1.2.1	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah	%	53,85	64,86	72,22	73,68	78,57	78,57

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada Rencana Strategis (Renstra) merupakan pendekatan atau keseluruhan cara yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam periode waktu 5 tahun. Strategis menjadi jembatan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang dan berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan dengan program serta kegiatan-kegiatan strategis Perangkat Daerah. Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan Pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan

kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam Menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, sistematis, dan terintegrasi dengan program Pembangunan daerah lainnya dibentuknya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, pendekatan berbasis *good governance* akan menjadi prinsip utama. Transparansi, partisipasi Masyarakat, dan akuntabilitas menjadi factor penting dalam memastikan dampak nyata bagi Masyarakat miskin. Penyusunan RPKD merupakan Langkah strategis berbasis data, serta tata Kelola yang inklusif, diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.2 Penahapan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

STRATEGIS DAERAH	STRATEGIS PD	ARAH KEBIJAKAN PD	2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin pemerintahan yang bersih dan kkn	Menyempurnakan perencanaan pembangunan yang adaptif sesuai dengan prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan adaptif	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan dan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Tahunan dan Rancangan Teknokratik Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan dan Tahunan
		Peningkatan kualitas kebijakan strategis berbasis riset dan inovasi	Penguatan kualitas kebijakan Strategis Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan kualitas kebijakan Strategis Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Kolaborasi dan Pemanfaatan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Riset dan Inovasi melalui Pengembangan talenta	Penguatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel	Peningkatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel

2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran Strategis pada Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasn Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program Tahun 2025

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas		1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		1 Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1, 1 Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	88	89	90	91	92	93	
			2 Indeks Penelitian dan Pengembangan Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		2 Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan Daerah	2, 1 Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan	%	53,85	64,86	72,22	73,68	78,57	78,57	

Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang mencapai kinerja Tahun 2025 Sebesar Rp. 43.745.157.835 Yang terdiri dari 4 Program, 17 kegiatan dan 92 Sub Kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

4 PROGRAM		17 KEGIATAN		92 SUB KEGIATAN	
No.	JENIS BELANJA			PAGU PERUBAHAN	
1.	Belanja Pegawai			17.052.038.601	
2.	Belanja Barang/Jasa			24.344.348.322	
3.	Belanja Modal			2.348.770.912	
	TOTAL			43.745.157.835	



Tabel 2.4 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.3	Pengadaan Mebel
1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
2.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
2.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
2.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD)
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)
3.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD)
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)
3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.1	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
4.1.1	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset
4.2	Invensi dan Inovasi
4.2.1	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
4.2.2	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
4.2.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan
4.2.4	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi
4.2.5	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
4.2.6	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi
4.2.7	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja dan target-target setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja yang diperjanjikan. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Bogor) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan serta merupakan wujud komitmen antara penerima Amanah dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia secara berkesinambungan setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan kondisi yang seharusnya dicapai, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik
	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	89
Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi Dasar Kebijakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	53.85

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik secara perorangan, organisasi atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi tersebut, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan, kemudian proses pengukuran kinerja tidak hanya sampai pada aspek masukan (*input*), keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) saja, tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang mampu menggambarkan kemanfaatan dan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan pada lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi yang menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan: PRTC adalah Pecapaian Rencana Tingkat Capaian

Kemudian hasil pengukuran akan diinterpretasi kinerja kedalam skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan Skala nilai Penilaian Kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana tabel diatas, dilakukan dengan menghitung rata-rata pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan kemudian diinterpretasi kinerja berdasarkan skala penilaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis terhadap indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Data hasil realisasi terhadap indikator kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja sasaran Tahun 2024 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	100
	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	100
TUJUAN					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	88	89	101,14
Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi Dasar Kebijakan Daerah	%	53,85	53,85	100

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan kriteria penilaian dari Tujuan yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas dengan Indikator pertama yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) mendapatkan capaian realisasi 100% dengan Predikat penilaian Baik. Pada indicator Tujuan ke dua yaitu Indeks Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan capaian realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat Baik dan Sasaran yang ke satu yaitu Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan hasil capaian realisasi sebesar 107,18. Serta Sasaran ke dua yaitu Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan mendapat capaian realisasi 100%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 menunjukkan nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100% dengan kriteria Penilaian **Sangat**

Tinggi. Hal ini tentu saja merupakan Upaya semua pihak yang secara konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Disamping itu peran Masyarakat dan stakeholder lainnya dalam setiap tahapan aktifitas perencanaan daerah yang secara signifikan memberikan kontribusi positif dalam implementasinya.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Sekarang dengan Tahun Sebelumnya

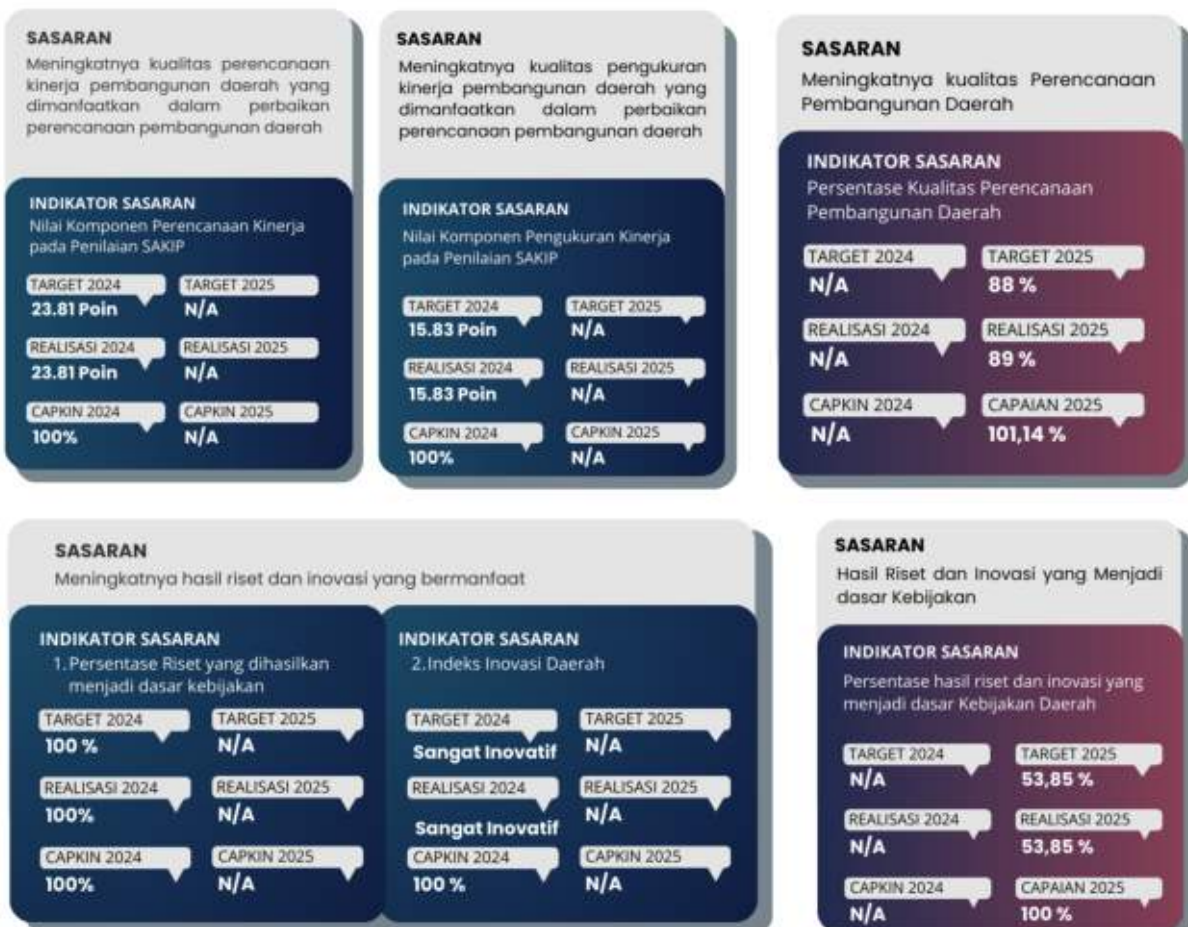
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan tahun sebelumnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan
Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	100
	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	100
TUJUAN					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	88	89	101,14
Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi Dasar Kebijakan Daerah	%	53,85	53,85	100

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Periode Renstra 2024-2026									
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang efisien, efektif dan berdampak positif ke masyarakat	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	n/a	n/a	n/a	23.81	23.81	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	n/a	n/a	n/a	15.83	15.83	100%
3	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Persentase Riset yang dihasilkan menjadi idasar kebijakan	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100%
		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	n/a	n/a	n/a	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%
Periode Renstra 2025-2029									
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	n/a	n/a	n/a	Baik	Baik	100%
		Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	n/a	n/a	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	88	89	101,14
3	Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	53.85	53,85	100%
Rata-rata Perbandingan Realisasi Kinerja									100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama serta Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dan tahun 2025 sehingga terdapat perbedaan cara hitung maupun cara pencapaiannya. Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berpedoman kepada Dokumen

Perubahan Renstra Periode Tahun 2024-2026 yang mengacu dari dokumen Perubahan - RPD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Sehingga untuk Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 mengacu kepada **Kualitas Perencanaan** dan **Pengukuran** pada komponen Penilaian SAKIP dengan nilai Tingkat capaian Kinerja masing-masing komponen sebesar 100%.

Untuk perhitungan Indikator Kinerja Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat pada Tahun 2024 dengan indikator sasaran Rekomendasi Penelitian/Kajian yang diakomodir dalam kebijakan Pembangunan mendapatkan hasil realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian realisasi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 sebesar 100%.

Sedangkan untuk perhitungan pada tahun 2025, terdapat perbedaan dalam pedoman dan cara hitung pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Periode 2025-2029. Pada data tabel di atas tercantum bahwa sasaran **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Berkualitas** memiliki 2 indikator, yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dengan capaian kinerja 101,14% dan Indeks Riset dan Inovasi Daerah (IRIDA), keduanya memperoleh capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah yang pertama yaitu Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian kinerja 100% dan Sasaran kedua yaitu Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan dengan indikator Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah Renstra

Perbandingan realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan target akhir Periode Renstra dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah Perencanaan Strategis (Renstra)



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah masing-masing sebesar 96,74% dan 68,53%. Hal ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai target akhir dari Rencana Strategis yang merujuk pada kinerja RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 diprediksi dapat terealisasi dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. oleh karena itu Upaya akselerasi pencapaian target kienrja di tahun berikutnya perlu dilakukan secara konsisten dan maksimal agar seluruh target akhir Pembangunan daerah di tahun 2029 baik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sendiri maupun target kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor secara keseluruhan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.4 Perbandingan Kinerja dengan Skala Nasional/Provinsi

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dan Indeks Riset dan Inovasi Daerah. Capaian IPPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebesar 89% sedangkan Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 97,42% sehingga Capaian IPPD Kabupaten Bogor terhadap IPPN sebesar 91,36%. Pada aspek penilaian kedua yaitu Indeks Riset dan Inovasi Daerah, terdapat 2 (dua) komponen penilaian yaitu Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Inovasi Daerah. Komponen yang dapat dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi dan Nasional adalah Indeks Inovasi Daerah. Pada tingkat Kabupaten Bogor, skor Indeks Inovasi Daerah berhasil mencapai 94,40 poin, sedangkan pada

tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 85,05 poin dan tingkat Nasional sebesar 96,80 poin. Perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan realisasi kinerja Provinsi/Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor konsisten dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6
Analisis Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Tahun 2025

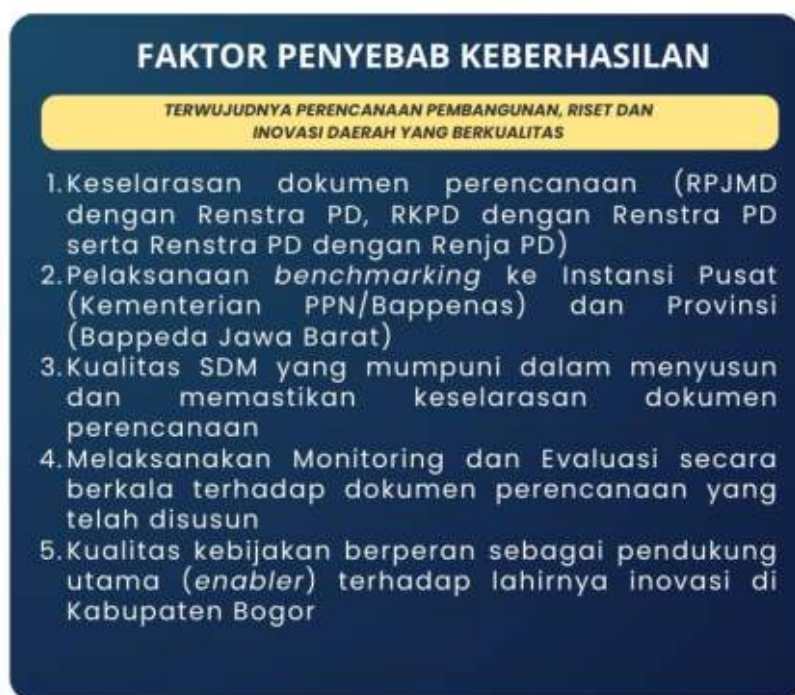


Tabel 3.7
Perbandingan Target Program dengan Realisasi Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Program	Program	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100%
2	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PDLingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80	97	121,25%
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		%	80	80	100%
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		%	80	94	117,5%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat	BB	BB	100%
4	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rekomendasi	7	7	100%

Berdasarkan tabel 3.7 diatas diketahui bahwa Tingkat Capaian masing-masing Program Utama untuk mendukung Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 memiliki realiasi rata-rata sebesar 106,47% dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai target pada Tahun 2025 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tercantum dalam infografis berikut :

Gambar 3.1
Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Target



Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh berbagai faktor penunjang, diantaranya yaitu Keselarasan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini merupakan prinsip sinkronisasi vertikal dan horizontal antara dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan yang berfungsi untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara efektif, efisien, dan konsisten. Dalam implementasi perencanaan Pembangunan daerah, diperlukan *benchmarking* dengan instansi pusat dan daerah agar terwujud proses sistematis untuk mengukur kinerja, kebijakan, dan layanan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain yang dianggap lebih maju atau memiliki praktik terbaik, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan koordinasi dan asistensi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Kualitas SDM yang mumpuni dalam penyusunan dokumen perencanaan (seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD) merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan yang terukur dan aplikatif. SDM yang berkualitas tinggi tidak hanya memahami teori perencanaan, tetapi juga memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang relevan. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun

dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Monitoring dan evaluasi (Money) dokumen perencanaan berfungsi untuk memastikan kesesuaian implementasi program dengan target, mengukur ketercapaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta menyediakan data untuk perbaikan kebijakan.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan menggunakan Anggaran APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp.42.318.796.204,00 atau sekitar 96.74% dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar 43.745.157.835,00 dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Realisasi Penggunaan Anggaran pada masing-masing Program dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025



Pada Tabel 3.8 menampilkan realisasi anggaran masing-masing Program Utama untuk mendukung capaian Kinerja Perangkat Daerah. Seluruh Program Utama memiliki Realisasi Anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi anggaran pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 4.61%, atau Rp. 129.646.017,00 dari

anggaran sebesar Rp. 2.812.100.386,00 dan realisasinya sebesar 2.682.454.369,00 efisiensi tersebut ada pada 4 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan dan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah didalamnya terdapat efisiensi dari belanja pengadaan, barang dan jasa.

Efisiensi anggaran selanjutnya pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 1.78% atau sebesar Rp. 194.476.668,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.908.084.932 dan realisasinya sebesar Rp. 10.713.608.264 efisiensi tersebut ada pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja honorarium narasumber dan moderator, belanja jasa honorarium, pengadaan, makan minum dan belanja perjalanan dinas.

Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3.58% atau Rp. 933.811.412,00 dari anggaran sebesar Rp. 26.081.550.523 dan realisasinya sebesar Rp. 25.147.739.111 efisiensi tersebut ada pada 8 (delapan) Kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Efisiensi dari delapan kegiatan tersebut terdapat pada belanja pengadaan dan belanja jamuan makan dan minum serta efisiensi belanja barang dan jasa.

Efisiensi anggaran selanjutnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 4.27% atau Rp. 168.427.534 dari anggaran sebesar Rp. 3.943.421.994 dan realisasi sebesar Rp. 3.774.994.460,00 efisiensi terdapat pada 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi terdapat pada belanja honorarium narasumber dan moderator, pengadaan, jamuan makan dan minum serta efisiensi belanja barang dan jasa.

Selanjutnya Tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025



No	Sasaran	Program	Anggaran		
			Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	95.39	4.61
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	98.22	1.78
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	100	96.42	3.58
	Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan	Program Riset dan Inovasi Daerah	100	95.73	4.27
Capaian Tingkat Efisiensi			100	96.74	3.26

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebesar 3,26%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,26% yang tergambarkan dalam pencapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama Tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang Berkualitas antara lain Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi Kebijakan.

Untuk mendukung/menunjang Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, didukung oleh kinerja dari masing-masing Bidang sebagai pengampu dari Sasaran Daerah, Sasaran Perangkat Daerah maupun sasaran Program Perangkat Daerah ataupun Kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

A. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah telah selaras dengan indikator Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah sebesar 100%. Artinya, seluruh Program pada dokumen RKPD telah sesuai dengan RPJMD serta Program pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah telah sesuai dengan RPJMD.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras didukung oleh Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 100%, kualitas analisis data dan informasi perangkat daerah terpenuhi sebesar 90%, Ketercapaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah meningkat sebesar 80%, serta Kualitas pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD mengalami peningkatan sebesar 100%.

Upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu diantaranya; tersedianya Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD sebanyak 3 dokumen, terwujudnya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain, terlaksananya Konsultasi Publik, terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUsrenbang) tingkat

Kabupaten/Kota, tersedianya 40 usulan yang telah terverifikasi oleh Kecamatan, ditetapkan 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD, terinputnya analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, terbinanya 511 orang dari berbagai Perangkat Daerah dalam pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan, terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, tersusunnya 2 laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah serta terlaksananya pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang pembangunan daerah.

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Keselarasan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dinilai dengan 3 indikator, diantaranya; indikator Keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian sebesar 97,41%, Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 79,69%, serta Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan rata-rata capaian sebesar 94,24% . Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebesar 89% yang menjadi angka capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD).

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 82%, Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 82% dan Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 82%.

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dalam upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, terlaksananya

monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan, Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan terlaksananya Sinkronisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Dalam upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian, Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dan terlaksananya Sinkronisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dalam upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tersusunnya 3 dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur, terlaksananya sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur, Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan terlaksananya Sinkronisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

C. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Hasil Riset dan Inovasi Daerah telah direkomendasikan menjadi Kebijakan dengan jumlah rekomendasi kebijakan berbasis riset dan inovasi yang dihasilkan sebanyak 7 rekomendasi.

Hasil Riset dan Inovasi Daerah telah direkomendasikan menjadi kebijakan didukung oleh terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan sebanyak 100%, terpenuhinya evaluasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar dengan indikator karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish sebesar 100% dan karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar sebesar 100%.

Adapun upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas yang diintervensi dengan Program Riset dan Inovasi Daerah yaitu terlaksananya penyusunan 9 naskah kebijakan berbasis hasil riset, terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan Kerjasama internasional, terlaksananya fasilitasi an pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi, terlaksananya fasilitasi an pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, terlaksananya fasilitasi an pembinaan untuk peningkatan difusi inovasi, Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah, Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi, serta terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi.

D. Program Strategis

Program Strategis merupakan program yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah utama, menjawab isu strategis, dan memaksimalkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1) Geopark Bogor Halimun Salak

Pengembangan sebuah Geopark memuat tata kelola Geopark guna mewujudkan Pelestarian (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) yang dilakukan bersama-sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sinergitas dan harmonisasi antar pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam pengembangan Geopark Kabupaten Bogor sebagai bagian dari strategi Pembangunan Daerah. Geopark tidak hanya berperan dalam pelestarian warisan geologi, hayati dan budaya tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan Masyarakat, serta peningkatan daya saing wilayah.

Sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperdalam kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor membentuk Forum Geopark Bogor Halimun Salak sebagai sarana strategis untuk menyamakan

persepsi, merumuskan arah kebijakan serta memperkuat komitmen bersama dalam pengembangan dan pengelolaan geopark secara terpadu.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan Forum Geopark tahun 2025 terdiri dari Penilaian Mandiri (*Self Assessment*), Sosialisasi dan Edukasi Geopark, Audiensi dan Laporan kepada Bupati Bogor serta Kunjungan Lapangan ke Geosite. Forum ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya penetapan Geopark Bogor Halimun Salak sebagai warisan geologi nasional dan internasional.

2) Grand Design Pendidikan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Secara umum, arah pembangunan pendidikan nasional dan daerah telah digariskan melalui berbagai dokumen perencanaan strategis.

Arah pembangunan pendidikan nasional dan daerah periode 2025-2045, secara sinergis berupaya untuk memajukan sektor pendidikan melalui di antaranya: peningkatan mutu kualitas, pemerataan akses, percepatan wajib belajar 13 tahun, pencapaian target kuantitatif spesifik, relevansi pendidikan terhadap konteks nasional dan global, serta penguatan transformasi dan talenta digital, talenta digital, serta adaptasi terhadap transformasi digital, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam target – target kuantitatif spesifik dan estimasi proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di tingkat kabupaten.

Berdasarkan beberapa di antara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, kondisi aktual pendidikan di Kabupaten Bogor masih menunjukkan adanya tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius diantaranya sebagai berikut:

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD/MI memang sudah cukup tinggi yaitu sebesar 97,48%, namun APM di jenjang SMP/MTs hanya mencapai 85,01%, dan lebih memprihatinkan lagi di jenjang SMA/SMK/MA yang hanya sebesar 52,05%.
- b) Menurut data dari website BPS Kabupaten Bogor (data 12 Maret 2025), Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor tahun 2024 juga belum optimal, yaitu sekitar 8,39 Tahun, di bawah RLS Provinsi Jawa Barat (8,87) dan Nasional (9,22) di tahun yang sama IPM Kabupaten Bogor (73,63) masih belum optimal berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat (74,92) dan IPM Indonesia (75,02) di tahun yang sama.

c) Masih ditemukan adanya kondisi bangunan sekolah yang rusak, serta kurangnya ruang kelas dan fasilitas pendukung terkait lainnya yang memadai, misalkan laboratorium, dll., terutama di kawasan perbatasan Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang)—Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Manusia (PPM)—bermaksud menyusun Grand Design Pendidikan di Kabupaten Bogor sebagai dokumen strategis yang memandu arah pembangunan pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan. Grand Design ini akan dirancang dengan melibatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan, dengan harapan untuk mendukung arah pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di bidang Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam infografis berikut ini:

Gambar 3.2

Sasaran, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kajian

MAKSUD pekerjaan ini adalah untuk mendukung arah pembangunan Nasional, Provinsi, dan terutama di Kabupaten Bogor di bidang pendidikan.		
TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP KAJIAN
Menyusun Dokumen Grand Design Pendidikan Kabupaten Bogor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya tinjauan literatur (pustaka) terkait konsep/model pendidikan di lokasi lain; 2. Tersusunnya tinjauan umum terhadap arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah terkait bidang pendidikan; 3. Tersusunnya identifikasi (diagnosis) kondisi, permasalahan/tantangan, dan analisis isu strategis terkait bidang pendidikan di Kabupaten Bogor; 4. Tersusunnya visi, misi, prinsip dasar pengembangan, dan pilar transformasi pendidikan di Kabupaten Bogor; 5. Tersusunnya strategi dan roadmap bidang pendidikan di Kabupaten Bogor; serta 6. Tersusunnya album peta yang terkait dengan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data/informasi dan perangkat daerah/instansi yang bertugas sebagai wali data, perwakilan masyarakat, narasumber, dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penyusunan Grand Design Pendidikan di Kabupaten Bogor; 2. Menyusun tinjauan literatur (pustaka) terkait konsep/model pendidikan di lokasi lain; 3. Menyusun tinjauan umum terhadap arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah terkait bidang pendidikan; 4. Mengidentifikasi (mendiagnosis) kondisi, permasalahan/tantangan, dan menganalisis isu strategis terkait bidang pendidikan di Kabupaten Bogor, berdasarkan perspektif/input/masukan dari para pemangku kepentingan terkait di bidang pendidikan; 5. Merancang visi, misi, prinsip dasar pengembangan, dan pilar transformasi pendidikan di Kabupaten Bogor, dengan mempertimbangkan masukan/koreksi dari para pemangku kepentingan terkait di bidang pendidikan; 6. Merumuskan konsep strategi, roadmap, sampai dengan indikasi program bidang pendidikan di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan masukan/koreksi dari para pemangku kepentingan terkait di bidang pendidikan; Hal ini berarti ruang lingkup konsep rekomendasi yang diberikan sampai dengan level indikasi program; 7. Menyusun album peta yang terkait dengan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor, dengan mempertimbangkan masukan/koreksi dari para pemangku kepentingan terkait di bidang pendidikan;



Rancangan Roadmap Bidang Pendidikan Kabupaten Bogor 2025–2045 disusun sebagai arah jangka panjang pembangunan pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tahapan prioritas yang menyesuaikan kapasitas daerah, kondisi wilayah, serta dinamika kebijakan nasional. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk memastikan seluruh komponen manajemen pendidikan bergerak selaras menuju peningkatan mutu, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bogor. Tahapan roadmap dibagi ke dalam empat periode pembangunan (2025–2029, 2030–2035, 2035–2039, dan 2040–2045) yang secara bertahap menekankan konsolidasi, penguatan,



ekspansi, dan keberlanjutan sistem pendidikan daerah. Setiap periode memprioritaskan komponen manajemen yang berbeda sesuai kebutuhan transformasi pendidikan yang adaptif terhadap tantangan abad ke-21.

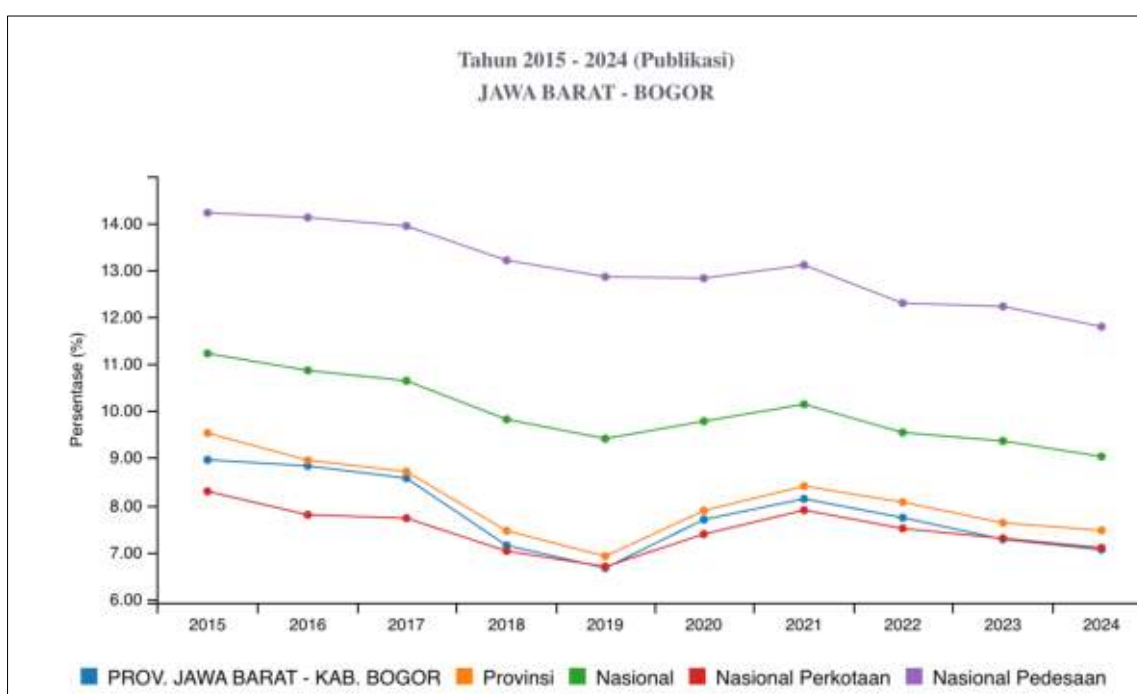
Penerapan prinsip-prinsip dasar, seperti inklusivitas, kolaborasi, pemerataan, kontekstualitas, dan keberlanjutan menjadi fondasi untuk membangun sistem pendidikan daerah yang responsif terhadap perubahan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Grand Design ini akan sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pendidikan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

3) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengawasi pelaksanaan program serta memastikan adanya evaluasi berkala guna mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya nasional dan internasional dalam pengentasan kemiskinan.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya nasional dan internasional dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah untuk mengetahui perkembangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir, merumuskan rekomendasi program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bogor dan mengetahui lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Grafik Tren Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2015 - 2024



Tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 7.05%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.22%. Akan tetapi, hal ini menunjukkan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bogor terbagi atas Strategi Utama dan Strategi Penunjang, sebagai berikut:

a) Strategi Utama

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, dan
3. Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

b) Strategi Penunjang

1. Satu Data Kemiskinan: Akurat, Terpadu, dan *Real-Time*;
2. Birokrasi Inklusif dan Responsif: Reformasi Tematik Berbasis Kemiskinan;
3. Kebijakan Pro-Rakyat: Regulasi yang Luwes, Responsif, dan Progresif;
4. Kekuatan (Pentahelix): Menyatukan Arah, Membagi Peran;
5. Konvergensi, Graduasi Mandiri, dan Duplikasi Inovasi;
6. Sistem Monev Adaptif: Mengukur Dampak, Bukan Hanya Serapan; dan
7. Penguatan TKPKD sebagai Komando Taktis Daerah.

4) Gelar Inovasi Daerah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan inovasi teknologi. Dinamika alih teknologi melalui akselerasi pengembangan model-model tata kelola mempunyai beberapa manfaat yang bersifat sistemik, hal tersebut dapat dilihat dalam implementasinya yang terangkum dalam program inovasi di daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, maka Kabupaten Bogor dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat Kabupaten Bogor memiliki penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan keterampilan serta daya saing yang kuat dalam mengelola Sumber Daya Alam. Salah satunya adalah melalui pengembangan strategi inovasi ataupun pemanfaatan Teknologi secara

optimal agar mampu menciptakan efisiensi dan produktifitas yang tinggi. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bogor, peran inovator dalam pembangunan sangatlah penting.

Sehubungan dengan upaya Pemerintah dalam menstimulasi tumbuh kembang inovator-inovator di Kabupaten Bogor, diperlukan adanya kegiatan yang dapat mewadahi dan menjembatani pengembangan karya inovasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan “Gelar Inovasi Daerah”. Penyelenggaraan Gelar Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 berhasil menjaring 176 peserta/inovator dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Daftar Peserta Gelar Inovasi Daerah

No.	Kategori	Jumlah Peserta
1.	Perangkat Daerah	25 Peserta
2.	Puskesmas	11 Peserta
3.	Perguruan Tinggi/Peneliti	21 Peserta
4.	Masyarakat Umum	36 Peserta
5.	Pelajar SMA/SMK	45 Peserta
6.	Pelajar SMP	38 Peserta
Total		176 Peserta

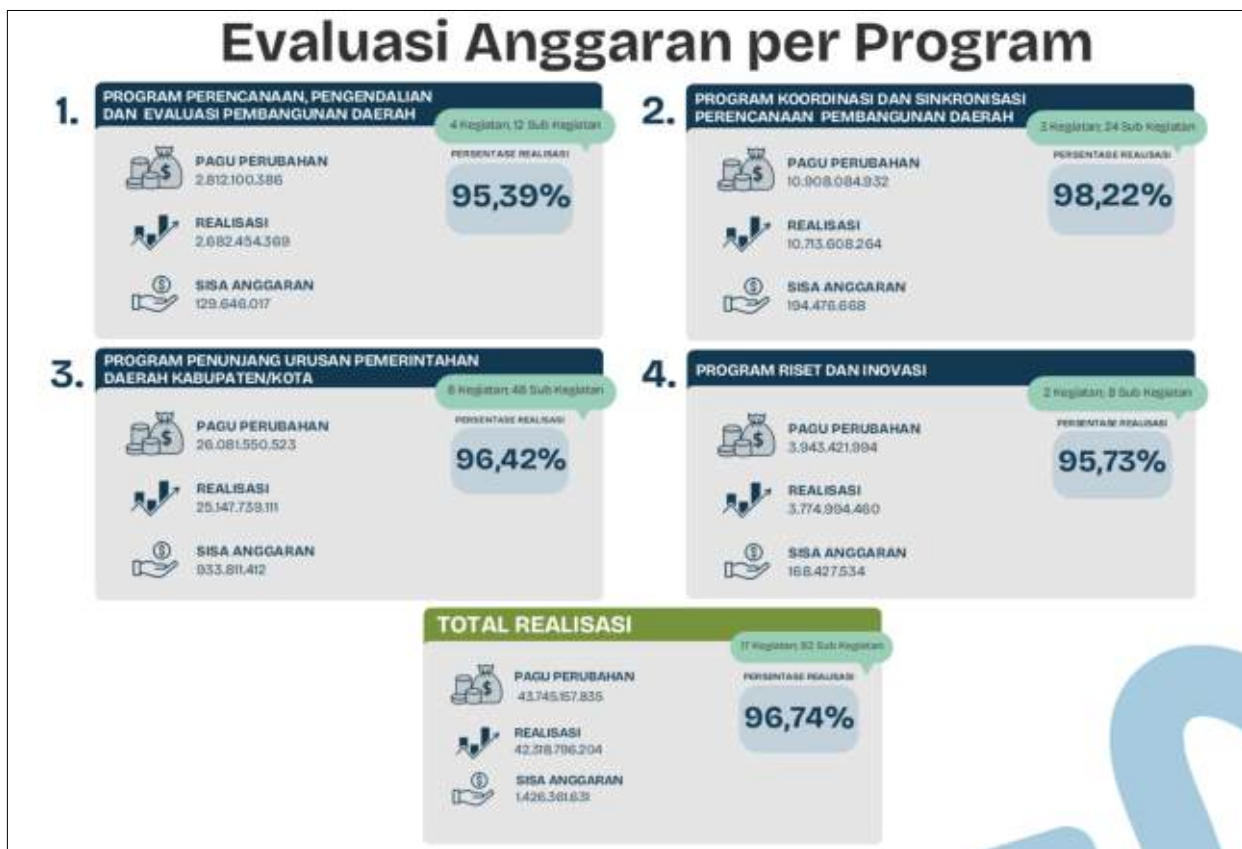
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingginya antusias masyarakat dalam memberikan inovasi terbaik bagi Kabupaten Bogor. Melalui Gelar Inovasi Daerah, berbagai inovasi unggulan berhasil teridentifikasi dan memperoleh apresiasi sesuai dengan kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya menghasilkan pemenang, Gelar Inovasi Daerah juga berperan sebagai wadah kolaborasi bagi inovator dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat implementasi inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, inovasi-inovasi yang telah dihasilkan diharapkan tidak hanya berhenti pada ajang kompetisi, tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendampingan, inkubasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, inovasi yang lahir dari masyarakat Kabupaten Bogor dapat terus berkembang dan memberikan

manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup serta daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengelola Anggaran sebesar Rp. 43.745.157.835,00 yang terealisasi sebesar Rp. 42.318.796.204,00 atau sekitar 96,74%. dalam Penyelenggaraan Program Kegiatannya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan 4 (empat) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 92 (Sembilan puluh dua) Sub Kegiatan yang penyerapan anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,081,550,523	25,147,739,111	933,811,412	96,42
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	461.838.682	444.424.980	17.413.702	96,23
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.226.412	157.666.704	7.559.708	95,42
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	22.669.531	21.111.201	1.558.330	93,13
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	14.631.299	13.579.740	1.051.559	92,81
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	15.660.047	14.363.400	1.296.647	91,72
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	11.914.907	10.899.090	1.015.817	91,47
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	22.662.034	21.125.865	1.536.169	93,22
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.380.927	198.626.040	2.754.887	98,63
5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.693.525	7.052.940	640.585	91,67
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.311.662.855	17.081.756.803	229.906.052	98,67
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	17.052.178.583	16.836.953.033	215.225.550	98,74
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd	133.826.236	126.700.880	7.125.356	94,68
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	15.550.462	14.073.690	1.476.772	90,50
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	16.126.276	14.360.200	1.766.076	89,05
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	93.981.298	89.669.000	4.312.298	95,41
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	32.332.332	29.060.491	3.271.841	89,88
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	12.766.444	11.307.980	1.458.464	88,58
5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd	6.762.981	6.279.250	483.731	92,85
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	12.802.907	11.473.261	1.329.646	89,61
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.609.047	461.002.870	21.606.177	95,52
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	28.142.553	26.872.000	1.270.553	95,49
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.558.363	21.721.590	1.836.773	92,20
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.238.996	15.275.380	1.963.616	88,61
5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	54.945	54.000	945	98,28
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	29.529.332	28.041.850	1.487.482	94,96
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	149.540.305	137.664.650	11.875.655	92,06
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	106.922.070	104.278.200	2.643.870	97,53
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	127.622.483	127.095.200	527.283	99,59
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.406.738.109	2.291.902.701	114.835.408	95,23
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	151.537.981	134.602.770	16.935.211	88,82

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	918.238.953	867.054.000	51.184.953	94,43
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	532.113.373	495.565.860	36.547.513	93,13
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.529.327	119.443.128	3.086.199	97,48
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.135.234	82.522.692	2.612.542	96,93
5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	109.951.752	109.880.000	71.752	99,93
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	418.009.013	415.362.051	2.646.962	99,37
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	20.518.517	19.349.000	1.169.517	94,30
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	48.703.959	48.123.200	580.759	98,81
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.042.512.878	1.016.539.750	25.973.128	97,51
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.068.228	37.000.000	68.228	99,82
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.713.700	578.600.000	7.113.700	98,79
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.030.616	9.850.000	180.616	98,20
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.972.025	2.220.000	752.025	74,70
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	305.601.204	291.136.500	14.464.704	95,27
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.127.105	97.733.250	3.393.855	96,64
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.010.199.240	1.941.447.120	68.752.120	96,58
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000	5.600.000	-	100,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	847.197.550	800.005.125	47.192.425	94,43
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.235.088	8.904.000	1.331.088	86,99
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.147.166.602	1.126.937.995	20.228.607	98,24
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.333.657.380	1.881.604.396	452.052.984	80,63
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.345.000	139.321.735	11.023.265	92,67
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	95.337.900	91.330.000	4.007.900	95,80
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.213.302.927	892.026.661	321.276.266	73,52
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	65.268.000	59.531.000	5.737.000	91,21
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	809.403.553	699.395.000	110.008.553	86,41
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.812.100.386	2.682.454.369	129.646.017	95,39
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.537.025.575	1.476.677.645	60.347.930	96,07
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	606.834.003	586.694.400	20.139.603	96,68
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	261.389.475	254.358.110	7.031.365	97,31
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	10.371.399	9.091.500	1.279.899	87,66
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah	27.592.939	25.931.400	1.661.539	93,98
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	283.312.692	280.903.420	2.409.272	99,15
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	110.485.499	105.962.159	4.523.340	95,91
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	237.039.568	213.736.656	23.302.912	90,17
5.01.02.2.02	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	965.059.428	914.199.240	50.860.188	94,73

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	806.684.388	762.165.990	44.518.398	94,48
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	158.375.040	152.033.250	6.341.790	96,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	189.759.526	184.370.326	5.389.200	97,16
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	147.562.694	145.471.236	2.091.458	98,58
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42.196.832	38.899.090	3.297.742	92,18
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	120.255.857	107.207.158	13.048.699	89,15
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	120.255.857	107.207.158	13.048.699	89,15
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.908.084.932	10.713.608.264	194.476.668	98,22
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	2.126.371.273	2.102.177.610	24.193.663	98,86
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	213.377.854	206.592.856	6.784.998	96,82
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48.839.218	46.760.400	2.078.818	95,74
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	41.999.345	40.319.960	1.679.385	96,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	84.251.070	81.545.100	2.705.970	96,79
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	849.603.107	844.728.215	4.874.892	99,43
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.649.473	78.241.970	2.407.503	97,01
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	83.544.781	81.851.156	1.693.625	97,97
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	724.106.425	722.137.953	1.968.472	99,73
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (sumber Daya Alam)	1.670.188.334	1.644.126.215	26.062.119	98,44
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	586.033.151	583.017.444	3.015.707	99,49
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.542.048	36.590.304	1.951.744	94,94
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.111.229	43.664.480	1.446.749	96,79
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	411.194.165	400.118.440	11.075.725	97,31
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	445.260.777	441.312.798	3.947.979	99,11
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda	43.665.528	41.680.045	1.985.483	95,45
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda	46.631.075	45.269.906	1.361.169	97,08

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)
		Rp	Rp	Rp	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda	53.750.361	52.472.798	1.277.563	97,62
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7.111.525.325	6.967.304.439	144.220.886	97,97
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	1.476.836.379	1.390.322.656	86.513.723	94,14
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	418.480.327	405.331.660	13.148.667	96,86
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.147.445	57.993.000	4.154.445	93,32
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.403.487.901	3.398.550.300	4.937.601	99,85
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	334.035.415	329.409.000	4.626.415	98,61
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.917.325	58.090.656	2.826.669	95,36
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	72.989.805	71.196.711	1.793.094	97,54
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.282.630.728	1.256.410.456	26.220.272	97,96
5.05.02	Program Riset dan Inovasi Daerah	3.943.421.994	3.774.994.460	168.427.534	95,73
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	3.108.919.640	2.999.155.461	109.764.179	96,47
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	3.108.919.640	2.999.155.461	109.764.179	96,47
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	834.502.354	775.838.999	58.663.355	92,97
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	112.545.156	95.779.428	16.765.728	85,10
5.05.03.2.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	100.387.267	85.454.111	14.933.156	85,12
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	28.227.284	27.029.654	1.197.630	95,76
5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	45.534.410	43.482.736	2.051.674	95,49
5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	89.334.255	78.174.914	11.159.341	87,51
5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	12.235.294	11.274.740	960.554	92,15
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	446.238.688	434.643.416	11.595.272	97,40
TOTAL ANGGARAN BAPPEDALITBANG TAHUN 2025		43.745.157.835	42.318.796.204	1.426.361.631	96,74

Bab IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban tahunan yang menyajikan capaian kinerja, target, serta penggunaan anggaran untuk mewujudkan perencanaan strategis dengan hasil nyata, meningkatkan transparansi serta efektivitas kinerja. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur Pelaporan Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Bogor dirumuskan melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama Kepala Bappedalitbang dengan pencapaian 100% dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran Sebesar 96,74% dari jumlah Anggaran sebesar Rp. 43.745.157.835,00 dan realisasinya sebesar Rp. 42.318.796.204,00 dengan interpretasi Kinerja Sangat Tinggi. Hal ini apabila di cermati lebih lanjut, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Bappedalitbang Kabupaten Bogor berhasil melakukan efisiensi sebanyak 3,26% dari total anggaran secara keseluruhan.

Proses penyusunan LKIP terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Proses ini mencakup pengumpulan data yang akurat, evaluasi kinerja, serta analisis akuntabilitas untuk memastikan laporan tersusun secara komprehensif. Keberhasil pencapaian target indikator program dan kegiatan tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan tersebut mencerminkan berjalannya sistem kerja yang efektif, dinamis, dan sinergis di Bapperida Kabupaten Bogor yang berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan komitmen yang kuat dan optimalisasi kapasitas sumber daya yang dimiliki, Bappedalitbang berhasil memaksimalkan potensi untuk

mencapai realisasi target indikator kinerja. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama. Tantangan ini menjadi agenda prioritas yang perlu ditindaklanjuti secara kolaboratif oleh seluruh pihak.

4.2 Saran

Saran dalam penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan rekomendasi strategis perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun berjalan, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta metode perhitungannya agar sesuai dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*);
2. Meningkatkan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja dalam mendukung ketercapaian visi misi yang telah ditetapkan;
3. Mendorong agar penggunaan anggaran lebih efisien dan benar-benar berdampak langsung pada pencapaian kinerja;
4. Meningkatkan peran inovasi dan penelitian terhadap pencapaian target pembangunan daerah; dan
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja Bappedalitbang Kabupaten Bogor, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Cibinong, 24 Februari 2026

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bogor



DR. BAMBAM SETIA AJI, S.T., M.B.A.
NIP. 19730501 200501 1 009

Kode	Unit es/Bidang/Lokasi Penyelenggaraan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan/atau Kegiatan (Output) Berdasarkan UPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang direvisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 110*100		13 = 11		14 = 1300*100				
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 110*100		13 = 11		14 = 1300*100		15		
		07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMDR/KPD)	12	Dokumen	4.962.151.837		3	dokumen	237.009.518	1	30.964.188	3	213.736.058	100,00	90,17	3	210.736.058	25,00	4,58	KATIM BIDANG PERENCANAAN DAN PENANGANAN	
5	01	02	2.03	Analisis Data dan Informasi Pemerintah di Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai kebutuhan	110	persen	7.021.174.300		90	persen	655.059.420	15	803.952.960	16	314.190.240	110,00	94,73	91	954.190.240	90	13,02	KATIM DATA DAN INFORMASI
		01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bermus Perencanaan Pembangunan Daerah)	10	dokumen	4.803.402.507		2	dokumen	800.584.318	0	747.135.490	2	702.165.990	100,00	94,48	2	702.165.990		15,70		
		02	Pembinaan dan Pemertan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dilina dalam Pemertan Data dan Informasi	2050	orang	2.167.771.702		511	orang	158.375.040	511	56.817.900	511	152.033.250	100,00	99,00	511	152.033.250		7,01	Pagi anggaran di target revisi lebih kecil bila dibanding dengan tahun berjalan (2025)	
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Ketercapaian (KU) Perangkat Daerah dan (TU) Pemerintah Daerah	85	persen	3.242.690.201		80	persen	150.759.326	80	92.975.332	10	184.370.326	110,00	97,16		164.370.326		5,00	KATIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN LAPORAN
		01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	50	Laporan	1.455.347.331		2	laporan	147.562.014	1	74.091.132	2	145.471.238	110,00	98,58	2	145.471.238	20	8,97		
		03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berbasis Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10	Laporan	1.704.292.870		2	laporan	42.196.812	1	19.884.200	2	38.899.090	100,00	92,19	2	38.899.090	20	2,18		
5	01	02	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemertan Pengelolaan Data pada RPJPD	110	persen	2.515.588.678		100	persen	120.255.857	100	42.471.066	100	107.207.158	100	89,15	101	107.207.158		4,26	KATIM DATA DAN INFORMASI
		01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dilinasi	15	Dokumen	2.515.588.678		3	dokumen	120.255.857	3	42.471.066	3	107.207.158	110,00	89,15	3	107.207.158	20	4,26		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output) berdasarkan CPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran:in Rencana PO Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025 (Aktif Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 110/100		13 = 11		14 = 134/100					
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 110/100		13 = 11		14 = 134/100		15			
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir/Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	12	Dokumen	2.025.551.000,00			3	Dokumen	940.003.107	1	272.795.063	3	544.726.215	100,00	99,43	1	941.726.215	25	32,14	KATM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15	Laporan	1.171.230.547,00			3	Laporan	80.640.473	1	10.345.076	3	78.241.970	100,00	97,01	1	78.241.970	20	6,89	KATM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25	Laporan	2.552.154.458,00			5	Laporan	83.544.731	2	34.107.664	5	81.851.158	100,00	97,97	5	81.851.158	20	3,21	KATM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Rajava dengan RKD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	15	Laporan	4.816.196.831,00			3	Laporan	724.196.415	3	423.079.253	3	722.137.963	100,00	96,73	1	722.137.963	20,00	15,64	KATM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN		
3	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Rata-rata Persebaran Kelengkapan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	87	persen	10.815.338.501			82	persen	1.870.196.334	21	1.254.788.985	82,10	1.044.126.215	100,00	96,44	81	1.844.126.215	94,25	15,20	BIDANG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir/Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	1.985.360.825			3	Dokumen	586.033.111	-	590.443.462	3	583.017.444	100,00	99,49	1	580.017.444	25	31,26	KATM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN		
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	12	Laporan	365.807.000			3	Laporan	38.542.048	-	672.700	3	38.596.304	100,00	94,84	1	38.596.304	25	10,25	KATM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN		

Kode	Unit es/Bidang/Unit Kerja/Instansi Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output) berdasarkan OPA	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang diawali			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang diawali		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2020 (Abit) Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 110/100		13 = 11		14 = 134/100						
1	2	3	4			5		6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 110/100		13 = 11		14 = 134/100		15				
		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	25	Laporan	605.557.434			5	laporan	45.111.239	3	17.254.480	5	43.864.480	100,00	99,79	5	43.864.480	20	6,58	KATIM BID. PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN		
		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Rencana dengan RKD/DRP/MD pada Bidang Perencanaan	15	Laporan	3.125.138.476			3	laporan	411.194.135	-	326.890.980	3	400.118.440	100,00	97,31	3	400.118.440	20	12,95	KATIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEREKONOMIAN DAN SDA		
		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	12	Dokumen	1.897.820.630			3	dokumen	445.290.777	2	360.047.900	3	441.312.796	100,00	99,11	3	441.312.796	25	25,98	KATIM BID. PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG SDA		
		06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15	Laporan	945.218.989			3	laporan	43.965.538	2	12.383.945	3	41.690.945	100,00	95,45	3	41.690.945	20	4,93	KATIM BID. PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG SDA		
		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25	Laporan	482.524.104			5	laporan	46.531.075	4	21.236.106	5	45.299.906	100,00	97,68	5	45.299.906	20	9,38	KATIM BID. PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG SDA		
		08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Rencana dengan RKD/DRP/MD pada Bidang SDA	15	Laporan	1.792.864.042			3	laporan	53.750.311	3	16.936.256	3	52.472.798	100,00	97,82	3	52.472.798	20	2,94	KATIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEREKONOMIAN DAN SDA		
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87	persen	27.400.520.980			82	persen	7.111.525.325	20,5	5.179.995.204	82,19	6.987.304.439	100,00	97,97	82	5.997.304.439	94	25,41	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	12	Dokumen	4.503.422.822			3	dokumen	1.478.636.379	3	1.170.680.632	3	1.390.322.666	100,00	94,14	3	1.390.322.666	25	30,87	KATIM BID. PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR

Kode	Uraian/Bidang/Luasan Pelaksanaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output) berdasarkan OPA	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021			Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (tahun 2025) yang divaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang divaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2020 (AM) r Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7x8+9x10	12 = 11x7/100	13 = 11	14 = 13x7/100	15				
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12	Laporan	1.803.175.742		3	laporan	418.480.317	3	240.887.525	3	405.331.660	100,00	95,96	3	401.331.660	25	21,72	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25	Laporan	411.406.621		5	laporan	62.147.445	5	40.067.500	5	57.993.000	100,00	93,32	5	57.993.000	20	14,10	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR
	04	Koordinasi Pelaksanaan Integrasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Raja dengan RKD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15	Laporan	7.122.909.880		3	laporan	3.403.487.911	0	2.396.494.100	3	3.398.550.300	100,00	99,85	3	3.398.550.300	20	47,71	KATIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP, PD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disinkronkan Penyusunannya (RP, PD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	3.501.286.198		3	dokumen	334.035.415	1	211.554.000	3	329.406.000	100,00	98,61	3	329.406.000	25	9,25	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15	Laporan	2.427.024.454		3	laporan	80.917.325	2	13.497.884	3	58.090.638	100,00	95,36	3	58.090.638	20	2,38	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20	Laporan	2.913.010.014		5	laporan	72.989.935	5	31.535.719	5	71.196.711	100,00	97,84	5	71.196.711	25	2,72	KATIM BID PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
	08	Koordinasi Pelaksanaan Integrasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Raja dengan RKD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	15	Laporan	4.903.273.638		3	laporan	1.282.630.738	2	1.074.949.084	3	1.256.410.400	100,00	97,96	3	1.256.410.400	20	25,59	KATIM SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5	05	3	PROGRAM Riset dan Inovasi DAERAH	Rakomendasi Kebijakan Berbasis T1 and dan Inovasi yang dibitkan	1	Rakomendasi	24.200.788.299,00		7	Rakomendasi	3.343.421.984	7	3.042.841.330	7	3.774.994.480	100,00	95,72	7	3.774.994.480	15,30/184	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Uraian Bidang Urutan Pelaksanaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) yang/ Kegiatan (Output) Tersebut/ Kegiatan DPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang diawali Juli			Realisasi Kinerja Pada Tahunan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang diawali		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2020 (Ab) + Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7x8+9x10	12 = 11x8+10x9	13 = 11	14 = 13x11	15 = 14 + 13x11x10					
5	06	03	2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Penelitian bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	110	%	14.777.855.374,00		100	persen	2.108.919.640	100	2.421.593.289	100	2.990.155.401	100,00	96,47	100	2.990.155.401	20,25403039	
				Terperuhnya nilai jamanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar	Karya tulis ilmiah berindex global lainnya yang terpublikasi	110	%															
					Karya tulis ilmiah berindex global yang terakreditasi	110	%															
			02	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset	37	naskah	14.777.855.374		0	naskah	3.108.919.640	0	2.421.593.289	0	2.990.155.401	100,00	96,47	0	2.990.155.401	20,25403039	
5	06	03	2.02	Inovasi dan Inovasi	Nilai Predikat Inovasi dan Inovasi Daerah	Sangat efektif	Predikat	9.422.554.865,00		Sangat Inovatif	Predikat	134.502.354	Sangat Inovatif	631.250.041	Tingkat Inovatif	775.836.999	100,00	92,97		775.836.999	8,21000306	
			02	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	5	Laporan	1.398.836.960,00		1	Laporan	112.545.136	0	16.896.190	1	65.779.428	100,00	89,10	1	65.779.428	7,05	
			05	Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan Jejaring Internasional	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk penguatan Jejaring Internasional	5	Laporan	1.813.031.919,00		1	Laporan	109.367.217	1	76.086.111	1	85.454.111	100,00	95,12	1	85.454.111	4,71	
			06	Fasilitasi dan Pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan Pemertanian Kekayaan Intelektual	Jumlah Fasilitas dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemertanian Kekayaan Intelektual (Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI)	5	Fasilitas	510.540.824,00		1	Laporan	28.227.214	1	17.151.054	1	27.029.654	100,00	95,75	1	27.029.654	5,29	
			07	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi	5	Laporan	817.296.743,00		1	Laporan	45.534.410	1	29.419.500	1	43.482.736	100,00	95,40	1	43.482.736	5,32	
			08	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/instansi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/instansi penelitian lainnya di daerah	5	Laporan	502.686.466,00		2	dokumen	86.334.215	2	41.928.674	2	76.174.914	100,00	87,51	2	76.174.914	15,55	

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan (Tahun 2025) yang diawalkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang diawalkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2025 (Abit Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Pemanggang Jawab	
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 13+14	13 = 11	14 = 13+14	15					
	011	Facilitasi dan Pembinaan untuk Perangkat Praktik baik seperti Pelaku kepada Pelaku Inovasi dan Desiminasi hasil Riset dan Inovasi kepada Pelaku Inovasi	5	Laporan	1.174.574.762,00			2	Laporan	12.235.214	0	4.266.880	2	11.274.740	100,00	92,15	2	1.274.740		0,96		
	012	Facilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	5	Laporan	2.244.395.210,00			1	Laporan	440.230.030	1	431.070.050	1	434.943.410	100,00	97,40	1	434.943.410		13,40		
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	BB	Predikst	211.030.171.158		BB	Predikst	20.081.550.523		6.268.318.535	BB	25.147.730.111	100,00	96,42	BB	25.147.730.111	BB	11,92	SEKRETARIS	
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																KATIM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KHERJA PD		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	2.493.125.481		8	dokumen	105.226.412	7	6.878.104	8	157.896.704	100,00	95,42	8	157.896.704	20	6,33	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	205.922.896		1	dokumen	22.669.511	1	21.111.201	1	21.111.201	100,00	93	1	21.111.201	20,00	7,94	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	164.148.041		1	dokumen	14.631.236	1	6.862.244	1	13.579.740	100,00	93	1	13.579.740	20,00	7,37	
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	245.960.308		1	dokumen	15.660.047	1	14.363.400	1	14.363.400	100,00	92	1	14.363.400	20,00	-	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	269.849.647		1	Dokumen	11.914.927	1	7.395.430	1	10.890.000	100,00	91	1	10.890.000	20,00	-	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	25	Dokumen	1.071.008.673		5	Laporan	22.862.034	4	3.971.325	5	21.125.685	100,00	93	5	21.125.685	20,00	1,07	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	1.592.833.516		5	Laporan	201.380.927	3	114.902.290	5	198.626.040	100,00	98,63	5	198.626.040	20	12,47	
		08	Penyelenggaraan Walikota Pendukung Stabilitas Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Stabilitas Sektoral Daerah	5	Laporan	79.065.383		1	Laporan	7.893.325	1	7.052.940	1	7.052.940	100,00	91,67	1	7.052.940			

Kode	Uraian/Bidang/Unitan Pelaksanaan Daerah dan Program/Ringkasan	Indikator Kinerja Program (Output) berdasarkan SPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Kinerja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 yang diarahkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja (R) Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 (%)		Uraian Perangkat Daerah yang bertanggung jawab				
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/10*100	13 = 11	14 = 13/11*100	15								
3	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	100	persen	136.549.393.019			100	persen	17.211.662.855	25	4.497.301.291	100	17.081.756.803	110,00	98,07	191	17.081.756.803	100,00	12,51	KATIM KEMUNGKIDAN	
			01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang	134.956.220.108,00			14	orang/bulan	17.052.178.510	3	4.304.000.562	100,00	16.836.963.033	110,00	98,74	11	16.836.963.033	20	12,46		
			02	Penyusunan/Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	00	Dokumen	291.919.041			12	Dokumen	133.826.216	3	103.308.580	100,00	126.700.880	110,00	94,68	11	121.700.880	20	43,40		
			03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Dokumen	176.178.809,29			1	Dokumen	15.550.412	1	1.799.239	100,00	14.073.696	110,00	90,50	1	14.073.696	20	7,98		
			04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Perencanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	165.084.910			1	Laporan	10.126.210	1	3.102.450	100,00	14.390.200	110,00	89,05	1	14.390.200	20	8,70		
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Laporan	960.190.090,26			2	Laporan	93.981.218	1	24.461.400	100,00	86.999.000	110,00	95,41	2	81.869.000	20,00	9,34		
3	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	100	persen	303.134.978			100	persen	12.332.332	25	10.638.719	110,00	29.960.491	110,00	89,68	101	21.060.401			KATIM LIMPEG	
			01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	Dokumen	100.796.732			2	dokumen	12.766.414	0	6.204.900	100,00	11.307.080	110,00	88,58	2	11.307.080	20	11,22		
			02	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	63.601.025			1	Laporan	6.782.611	0	5.579.750	100,00	8.270.250	110,00	92,85	1	8.270.250	20	7,51		
			03	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	Laporan	118.767.221			4	Laporan	12.802.517	2	940.000	100,00	11.473.281	110,00	89,81	3	11.473.281	20	9,66		
3	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	100	persen	4.338.822.432			100	persen	182.809.047	25	101.426.480	110,00	461.002.870	110,00	95,52	991	461.002.870			10,63	KATIM LIMPEG
			01	Persediaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	60	Dokumen	198.618.660			12	Dokumen	17.238.616	4	3.279.380	100,00	15.275.380	110,00	88,61	11	11.275.380	20	7,09		
			02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	00	Dokumen	609.540.504			12	Dokumen	28.528.212	4	11.280.000	100,00	29.041.850	110,00	94,06	11	21.041.850	20	4,25		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) berdasarkan DPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang direvisasi			Realisasi Kinerja Pada Tahunan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang direvisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	S	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/9*100	13 = 11	14 = 13/4*100	15							
		03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53	orang	593.782.548			10	Orang	140.540.265	0	5.200.000	10	137.964.650	100,00	92,06	18	137.964.650	20	24,42			
		04 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	675	orang	253.062.063			135	Orang	106.922.070	0	81.864.100	135	104.275.200	100,00	97,53	135	104.275.200	20	-			
		05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135	Orang	1.438.967.157			27	Orang	127.622.483	0	-	27	127.095.200	100,00	99,59	27	127.095.200	20,00	8,83			
		06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai	5930	Unit	217.687.199			180	Unit	28.142.553	0	-	180	28.672.000	100,00	95,49	180	28.672.000					
		07 Pengadaan Pakelan Dinas beserta Abkut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Abkut Kelengkapannya	15	Paket	918.796.386			3	Paket	23.556.383	0	-	3	21.721.590	100,00	92,26	3	21.721.590					
		08 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Dokumen	101.250.524			12	Dokumen	54.045	12	54.000	12	54.000	100,00	98,28	12	54.000					
3	01	01	2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemerataan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	100	persen	14.221.534.283			100	persen	2.406.738.199	25	793.281.345	100,00	95,23	100	2.291.902.701	100	14,13	KATIM UMPEG		
				01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	787.295.400			4	paket	151.537.981	1	27.871.170	4	134.662.770	100,00	88,82	4	134.662.770	20	17,10	
				02 Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	19	Paket	2.469.440.272			2	paket	918.238.953	0	108.338.000	2	867.054.000	100,00	94,43	2	867.054.000	20	34,82	
				03 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	2.953.290.416			5	paket	532.113.373	1	251.303.820	5	495.565.860	100,00	93,13	5	495.565.860	50	16,71	
				04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	3.894.412.803			12	paket	122.520.327	3	80.945.060	12	119.443.128	100,00	97,48	12	119.443.128	80	3,07	
				05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	20	paket	1.067.100.340			4	paket	85.135.234	2	7.863.810	4	82.522.892	100,00	96,93	4	82.522.892	20	7,52	
				06 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	Laporan	1.025.453.091			12	laporan	109.951.732	3	74.892.000	12	109.880.000	100,00	99,93	12	109.880.000	20	10,72	
				07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	3.274.697.140			400	laporan	418.009.013	307	204.934.466	450	415.362.051	100,00	99,37	450	415.362.051	750,00	12,08	
				08 Penatausahaan Anis Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anis Dinamis pada SKPD	20	Dokumen	259.073.842			12	Dokumen	20.518.517	3	12.432.000	12	19.340.000	100,00	94,36	12	19.340.000	60	9,53	
				09 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	493.836.088			1	Dokumen	48.703.950	1	44.700.000	1	48.123.200	100,00	98,81	1	48.123.200	20	9,74	

Kode	Uraian Bidang Luas Penyelenggaraan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) berdasarkan CPA	Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 (Abit Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)			
			K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
																				10	
1	2	3	4			5			6			10		11 = 7+8+9+10		12 = 10/100		13 = 11		14 = 13/100	
00	Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3	Unit	12.021.510.000			3	unit	1.213.302.917	3	902.026.881	3	902.026.881	100	73,52	3	902.026.881	80,00	7,41	
010	Perencanaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	310	Unit	1.378.400.000			72	unit	65.266.910	71	18.961.500	73	56.331.000	100,00	91,21	71	56.331.000	20,80	4,32	
011	Perencanaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	10	Unit	743.680.000			1	unit	800.400.513	1	900.395.000	1	900.395.000	100,00	90,41	1	900.395.000	10,00	94,05	
Jumlah Program :			4		319.772.298.745			Rp. Anggaran			43.743.187.815	30.321.943.939	Realisasi	42.318.794.204	70	96,74		42.318.794.204		13,24	
Jumlah Kegiatan :			17																		
Jumlah Sub Kegiatan :			92																		
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)												100,00	SANGAT TINGGI								
REALISASI ANGGARAN												96,74	SANGAT TINGGI								
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTPUT/INDIKATOR PROGRAM)												95,08	SANGAT TINGGI								
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/KEJARAN KEGIATAN)												100,00	SANGAT TINGGI								
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/KEJARAN SUB KEGIATAN)												100,00	SANGAT TINGGI								
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN												94,45	SANGAT TINGGI								
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pengurangan Anggaran pada Perubahan Perwil Tahun 2025 sehingga berdampak pada proses pelaksanaan - Terbatasnya anggaran kegiatan yang akan di anggarkan serta dibayarkan di tahun 2025 dikarenakan kendala administrasi di Bidang Anggaran pada tahun 2025 																					
Tindak lanjut dari faktor penghambat:																					
<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi secara internal ke Bidang Perencanaan Keuangan dalam proses realisasi ke anggaran - Berkoordinasi secara internal ke Bidang Anggaran dalam proses realisasi keuangan 																					

Cibinong, Januari 2025

Disusun

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BOGOR



Dr. R. Nuzulita Sariyanti, S.P., M.P.A.
Pembina T.
NIP. 197305012003011005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BAPPEDALITBANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
097305012005011009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik
		Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	88
3	Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah	%	53.85

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,063,803,728	APBD
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,829,847,181	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	10,908,084,932	APBD
4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3,108,919,640	APBD


 BUPATI BOGOR,

 RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

 Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
 NRP. 197305012005011009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TITI SUGIARTI, S.T
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

TITI SUGIARTI, S.T
NIP. 197608012002122004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang berkuaklitas	%	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	%	100
3	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100
4	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	%	100
5	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100
6	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	100
7	meningkatkan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100
8	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	461,838,682	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,311,522,873	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32,332,332	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482,609,047	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,370,000,204	APBD

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,042,512,878	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,029,330,331	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,333,657,380	APBD

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,


Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,


TITI SUGARTI, S.T
NIP. 197608012002122004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HEKSI LESTARI ST, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

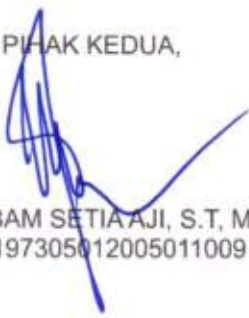
Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,


HEKSI LESTARI ST, M.Si
NIP. 197509061999012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100
2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Ketentuan yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100
3	Terpenuhinya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	90
4	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	80
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,554,772,370	APBD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	965,059,428	APBD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	189,759,526	APBD

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	120,255,857	APBD

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,



Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN,



HEKSI LESTARI ST, M.Si
NIP. 197509061999012001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIKA MUSTIKA EFFENDI ST, M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,


TIKA MUSTIKA EFFENDI ST, M.Sc
NIP. 197507162005012009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80
2	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	82

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,126,371,273	APBD

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,


 Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
 NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
 PEMBANGUNAN MANUSIA,


 TIKA MUSTIKA EFFENDI ST, M.Sc
 NIP. 197507162005012009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMI KARMELLIA S.HUT, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

RAHMI KARMELLIA S.HUT, M.Si
NIP. 197208211998032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	80
2	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	82

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,670,188,334	APBD

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

Dr BAMBAM SETIAAJI, S.T, MBA
 NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER
 DAYA ALAM,

RAHMI KARMELLIA S.HUT, M.Si
 NIP. 197208211998032004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF RACHMAN SUHANDI S.IP, M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

ARIF RACHMAN SUHANDI S.IP, M.M
NIP. 197406172002121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	80
2	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	82

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7,111,525,325	APBD

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,


Dr BAMBAM SETIAAJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH,


ARIF RACHMAN SUHANDI S.IP, M.M
NIP. 197406172002121003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. RATNA PRATINI ST, MM, IPM
Jabatan : KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

Ir. RATNA PRATINI ST, MM, IPM
NIP. 197912192005012007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Rekomendasi	7
2	Terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	%	100
3	Persentase hasil evaluasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar	Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	%	100
		karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	%	100
4	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Perangkat Daerah yang bermanfaat	Nilai Predikat Inovasi dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	3,108,919,640	APBD
2	Inovasi dan Inovasi	834,502,354	APBD

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,


 Dr BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
 NIP. 197305012005011009

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN
 PENELITIAN,


 Ir. RATNA PRATINI ST, MM., IPM
 NIP. 197912192005012007